

## PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

# SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. ( 0291) 591492 ( 10 saluran ) Fax. 91037 Tlx. 227764 JEPARA 59411

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 180/13/14 TAHUN 2025

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 180/6/KS TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEPARA TAHUN 2025

### SEKRETARIS DAERAH,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan visi dan misi bupati dan dengan adanya dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Bupati maka perlu meninjau kembali Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 180/6/KS Tahun 2025 tentang Daftar Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Jepara Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 180/6/KS Tahun 2025 tentang Daftar Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Jepara Tahun 2025;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 5. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 180/6/KS Tahun 2025 tentang Daftar Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Jepara Tahun 2025;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Me

Mengubah untuk pertama kali Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 180/6/KS Tahun 2025 tentang Daftar Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Jepara Tahun 2025, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal 21 April 2025

an. BUPATI JEPARA
Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Jepara

ARY **B**ACHTIAR

# LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 180/13/KS Tahun 2025

TANGGAL: 21 April 2025

## DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEPARA TAHUN 2025

NO	SKPD	TONIC		S	TATUS		
NO	PENGUSUL	JENIS	TENTANG	BARU	UBAH	DASAR PELAKSANAAN	KETERANGAN
2.	DISHUB	Perbup	Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Baru		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persayaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan</li> <li>Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</li> </ol>	
2.	DISHOB	Perbup	1.Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum	baru	F	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> </ol>	
			2. Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Penyeberangan Jepara	baru	-	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> </ol>	

3. Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah	1	<ul> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan;</li> <li>4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;</li> </ul>
Angkutan Penumpang Perdesaan dan Perkotaan Kelas Ekonomi Kabupaten Jepara	baru	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.</li> </ol>
4. Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas	baru	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
5. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penyeberangan Siginjai pada Lintas Penyeberangan Jepara-Karimunjawa	baru	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan FormulasiPerhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan</li> </ol>
6. Peraturan Bupati Tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor	Baru	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</li> </ol>

(2	DINGOODEDMACDEG D	1 7 1 1 7 1 1 1 1 1 1 7 7	T		1.		
3.	DINSOSPERMASDES Perbup	1. Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa	Baru	-	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;	
					2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	
j					ļ	Pemerintahan Daerah;	
			]		3	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014	
			]		Γ.	tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	
						Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	
						Nomor o randii 2014 tentang Desa	
		2. Pengelolaan Dana Desa	Baru	-	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang	
1						Desa;	
					۲.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	
1					L	Pemerintahan Daerah;	
ŀ					3.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014	
						tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	
					<u> </u>	Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	
		3. Pedoman Penyusunan APBDesa	Baru	-	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;	
					2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	
						Pemerintahan Daerah;	
					3.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014	
						tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	
						Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	
					4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20	
				····	<u> </u>	Tahun 2018	ĺ
1		4. Pengelolaan Aset Desa	Baru		1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang	
						Desa;	ĺ
					2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	
						Pemerintahan Daerah;	
					3.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014	1
						tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	
						Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	
.					4.	Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 1 Tahun	
						2016 tentang Pengelolaan Aset Desa	
		5.Pedoman Pemberian, Penyaluran dan	Baru		1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang	$\dashv$
		Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan				Desa;	ĺ
	İ	Khusus kepada Pemerintah Desa			2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	
						Pemerintahan Daerah;	ł
					3.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014	
					٥.		J
						tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	i
		6. Penyandang Disabilitas	Por		1	Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	
		o. i chyandang Disabilitas	Baru	-	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang	
						Desa;	
					4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	
						Pemerintahan Daerah;	- 1
1 1					3.	Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyandang	]
L					<u></u>	Disabilitas.	

Γ	T	7 Julius Burnellin (Carlot)			
		7. Jaring Pengaman Sosial  8. Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan			<ol> <li>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang</li> </ol>
		Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Jepara Tahun 2025			Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
4.	BAGIAN ORGANISASI Perbup	Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD Pada Perangkat Daerah.	-	ubah	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Permendagri 12/2017 tentang pedoman pembentukan &amp; klasifikasi cabang dinas dan UPTD</li> </ol>
		2.Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DPUPR			<ol> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Permendagri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil, pemetaan dan pedoman organisasi perangkat daerah bidang pertanahan</li> <li>Permendagri Nomor 106 No 2017 tentang Pedoman nomenklatur PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang PUPR</li> </ol>
		3. Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja SatpolPP & Damkar	Baru		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara</li> </ol>
		4.Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Bapperida	Baru	_	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten</li> </ol>

5 Voda dalaa Carra O		Jepara; 3. Permendagri No 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, pembentukan dan nomenklatur BRIDA	
5.Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Bakesbangpol	Baru -	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;</li> </ol>	
6.Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara; 3. Permen PANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang pedoman Evaluasi Jabatan 4. Permen PANRB Nomor 656 tahun 2023 tentang nomenklatur jabatan pelaksana PNS di lingkungan Instansi Pemerintah	
7.Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.	Baru -	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;</li> <li>Permen Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;</li> </ol>	
8.Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,	- Ubah	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	
 or randin 2010 tentang kedudukan,		Pemerintahan Daerah;	

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati.		<ol> <li>Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah</li> </ol>
9.Tambahan Penghasilan Pegawai	Baru	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;</li> <li>Kepmendagri No 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Mendagri terhadap TPP ASN di Lingkungan Pemda</li> </ol>
10.Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Baru -	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang     Pemerintahan Daerah;     Permendagri No 1 Tahun 2023 Tentang     Tata Naskah dinas di Lingkungan Pemda
11. Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah,	Baru -	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;</li> <li>Perpres No 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN</li> </ol>
12. Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	Baru	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

		<del></del>	T	····	Denotes Donale None 14 Malana 2016	
ĺ		<u> </u>			2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016	
ŀ					tentang Perangkat Daerah Kabupaten	
					Jepara sebagaimana telah diubah dengan	
					sebagaimana telah diubah dengan Perda	
					Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan	
					Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun	
				İ	2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten	
					Jepara;	
					3. Permendagri Nomor 11 tahun	
					2020 tentang Pakaian Dinas ASN di	
					Lingkungan Kemendagri dan Pemda	
		<del></del>	13. Kedudukan, Susunan Organisasi,	Port	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	
			Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja		Pemerintahan Daerah;	
			DP3AP2KB.		2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016	
					tentang Perangkat Daerah Kabupaten	
				•	Jepara sebagaimana telah diubah dengan	
					sebagaimana telah diubah dengan Perda	
1	1			·	Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan	
1					Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun	
	1	ŀ			2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten	
		•			Jepara;	
					3. Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun	
					2021 tentang Pedoman Nomenklatur	
1					Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan	
					Perempuan dan Perlindungan Anak.	
					1 orompaan aan 1 ormaangan maa.	
			14. Standar Kompetensi Jabatan ASN di	baru	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	
			Lingkungan Pemerintah Daerah.		Pemerintahan Daerah;	
		1			2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016	
					tentang Perangkat Daerah Kabupaten	
					Jepara sebagaimana telah diubah dengan	
		1			sebagaimana telah diubah dengan Perda	
1						
					Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan	
1					Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun	
					2016 tentang Perangkat Daerah	
					Kabupaten Jepara;	
					3. Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2017	
		1			tentang Standar Kompetensi Jabatan	
					ASN.	
_	DISPERKIM	Dorby	1. Peraturan Pelaksana Peraturan	Baru -	1 Parmandagri No O Tahun 2000 tantang	
5.	DISPERMIN	Perbup		Datu -	1. Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang	
1			Daerah Jepara Nomor 8 Tahun 2021		Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan	
1			tentang Penyediaan dan Penyerahan		Utilitas Perumahan dan Permukiman di	
1			Prasarana, Sarana dan Utilitas		Daerah; dan	
1		i	Perumahan dan Permukiman		2. Perda No 8 Tahun 2021 tentang Penyediaan	
		1		ı	dan Penyerahan Prasarana , Sarana dan	1

•

		<del></del>			T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T
<u> </u>					Utilitas Perumahan dan Permukiman.
		-	<ol><li>Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni</li></ol>	Baru	- 1. Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang
	•		di Wilayah Kabupaten Jepara		Perumahan dan Kawasan Permukiman;
					2. Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang
					Penanganan Fakir Miskin;
		1	3. Rencana Pembangunan dan	Baru	- 1. Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang
			Pengembangan Perumahan dan		Perumahan dan Kawasan Permukiman;
			Kawasan Permukiman (RP3KP)		2. Permen Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun
					2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
					Pembangunan dan Pengembangan
	1				Perumahan dan Kawasan Permukiman
					(RP3KB) Daerah Provinsi dan Daerah
					Kabupaten/Kota
_					
6.	BPKAD	Perbup	1. Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan	Baru	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		_	Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang		Pemerintahan Daerah
			Bersumber Dari Anggaran Pendapatan		2. Peraturan Pemerintah tentang Pemberian
	1	}	Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran		Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
			2025		1 disjuised that they dail day isoliga bolas
		Perbup	2. Perubahan Peraturan Bupati tentang		Ubah 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		- 1	Standar Harga Di Lingkungan		Pemerintahan Daerah
			Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun		2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
		1	2025		tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
					3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
		1			Standar Harga Satuan Regional
					Standar Harga Satuan Regional
		1			
		Perbup	3. Standar Harga Di Lingkungan	Baru	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
			Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun		Pemerintahan Daerah
		1	2026 ( beserta perubahannya)		2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
					tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
					3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
					tentang Standar Harga Satuan Regional
					4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9
					Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
		1			Keuangan Daerah
		Perbup	4. Penjabaran Pertanggungjawaban	Dage	1 II-l- II-l II-l II-l II-l II-l II-l II
		Leroup		Baru	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
			Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan		Pemerintahan Daerah
			Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024		2. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024
					tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
					Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
			<u></u>		2024.

	Perbup	5. Penentuan Kemampuan Keuangan		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
1		Daerah Dan Pemberian Tunjangan		Pemerintahan Daerah;
		Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses,		2. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8
		Dan Dana Operasional Dewan		Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
		Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026		Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
	İ	101 Walliam 1 Mary at David 1 Milan 2020		Kabupaten Jepara.
				3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
			I	3. Feratural Menteri Daian Negeri Nomoi Oz Tanun
1	[		i	2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
				Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
				Pertanggungjawaban Dana Operasional
·	Perbup	7. Penjabaran Pertanggungjawaban		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
		Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan		Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah
		Belanja Daerah Tahun 2024		Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang
		•		Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
	Perbup	8. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Baru	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
				Pemerintahan Daerah;
				2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
				tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lem
	1			baran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
				Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
				Republik Indonesia Nomor 5165)
	ļ			3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
				2020 tentang Pedom an Teknis Pengelolaan K
				euangan D aerah (Berita Negara Republik
				Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
	Perbup	9. Petunjuk Pemungutan Pajak Daerah	Baru	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	-	• • •		Pemerintahan Daerah;
				2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 22 Hubungan
				Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
				Pemerintahan Daerah
				3. Peratarun Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
				tentang Ketentuan umum pajak daerah dan
				retribusi daerah
				4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
				Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Perbup	10. Petunjuk Pemungutan Retribusi Daerah	Baru	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
				Pemerintahan Daerah;
	İ			2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 22 Hubungan
			1	Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
				Pemerintahan Daerah
				3. Peratarun Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
				Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan
			1	Retribusi Daerah
			1	
				4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang
<u> </u>	D1	11 D 1 1 77 1 4		Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
	Perbup	11. Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati		Ubah 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

	ĺ	Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem			Pemerintahan Daerah
		dan Prosedur Pengelolaan Keuangan			2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
	li	Daerah			Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
	Perbup	12. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor		ubah	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran			Pemerintahan Daerah
	·	APBD TA.2025 (beserta perubahannya)			2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
					Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
	Perbup	15. Peraturan Bupati Tentang Penjabaran	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Perubahan APBD TA.2025			Pemerintahan Daerah;
					2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
	1				Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
	Perbup	16. Peraturan Bupati Tentang Perubahan		Ubah	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	Croup	Atas Perbup tentang Penjabaran			Pemerintahan Daerah;
		Perubahan APBD TA.2024 (beserta			2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
		· ·			Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
	Danh	perubahannya)	Domi		
	Perbup	17. Peraturan Bupati Tentang Penjabaran	Daru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		APBD TA.2026			Pemerintahan Daerah;
	[	į			2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
					Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
	Perbup	18. Analisis Standar Belanja Tahun	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Anggaran 2026			Pemerintahan Daerah.
					2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
					tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
					3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
					2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
					Keuangan Daerah
	Perbup	<ol><li>Peraturan Bupati tentang Mekanisme</li></ol>	1		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Penyusunan, Persetujuan dan			Pemerintahan Daerah.
	1	pengesahan DPA dan pembayaran atas			2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
İ		beban APBD			tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
	]				3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
}					2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
					Keuangan Daerah
	Perbup	20. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja			1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat			Pemerintahan Daerah;
		Daerah Tahun Anggaran 2025			2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
					tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
					3. Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan
					APBD TA. 2025
	<u> </u>				
	Perbup	21. Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Bagi PNS dan Non PNS			Pemerintahan Daerah;
					2. PMK 119 th 2023 tentang Perubahan atas
					Peraturan Menteri Keuangan Nomor
					113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas
					Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
	<u> </u>				

			<del>                                     </del>	dan Pegawai Tidak Tetap
				dair egawar ridak retap
	Perb	up 22. Bagan Akun Standar	Baru	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ol>
	Perb	up 23. Perubahan Kedua Atas Perbup Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntas Pemerintah Kabupaten Jepara.		ubah 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
		24. Perubahan Atas Perbup Nomor 15 Tahur 2025 tentang Pemberian Insenti Pemungutan Pajak Daerah dan Retribus Daerah	f	ubah 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. DP	PUPR Perb	Kawasan Perkotaan Welahan		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang         Penataan Ruang;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang         Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang         Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten         Jepara Tahun 2023-2043</li> </ol>
		2. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mlonggo	g Baru	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043</li> </ol>
		3. Tata Cara Pengenaan Sanks Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043</li> </ol>
		4. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Baru	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Γ	T	1			<del></del>	D 71711 1 77 1	
						Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043	
8.	DP3AP2KB	Perbup	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Desa		ubah	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusatamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011	
9.	BKD	Perbup	1. Pendelegasian Sebagian Wewenang Menandatangani Keputusan Di Bidang Kepegawaian			Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	
			<ol> <li>Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara</li> </ol>			Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	
			3. Pedoman Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara			Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	
10.	Bagian Pemerintahan	Perbup	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027	Baru		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	
11.	Dinas Lingkungan Hidup	_	Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sanksi Administratif kepada Kepala DLH.	Baru		Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	
12	Bappeda	Perbup	1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Baru		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi	

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
					Undang-Undang;	
	Perbup	2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Baru		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah</li> </ol>	-
					diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
	Perbup	3. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025		Ubah	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	
					2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
	Perbup	4. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Baru		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
12	Perbup	5. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah	Baru		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah	
13.	Dinas Kearsipan dan Perbup	1. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses	Baru	1	l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	7

	Dominatolica		A Di		77, 11, 76, 17, 11
	Perpustakaan		Arsip Dinamis		Keterbukaan Informasi Publik;  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
			2. Kode Klasifikasi dan Jadwal Retensi Arsip Subtantif di Lingkungan Pemerintah Daerah.	Baru	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> </ol>
14.	RSUD RA Kartini	Perbup	1. Peraturan Internal RSUD RA Kartini	Baru	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
			2. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD RA Kartini.	Baru	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
15.	Bagian Perekonomian	Perbup	1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo	Baru	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
			2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha	Baru	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

					Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
			3. Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo	baru	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
16.	Diskominfo	Perbup	Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112	baru	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelayanan Nomor Tunggal 112;
17.		Perbup	Pemberian Insentif Bagi Kader Kesehatan Sejahtera Kabupaten Jepara	baru	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu</li> </ol>
18	DKPP	Perbup	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	baru	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

an. BUPATI JEPARA

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara

ARY BACHTIAR